

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Banjir dan Sekolah Gratis Prioritas Jakarta Tahun 2025

**JAKARTA, KOMPAS** — Eksekutif dan legislatif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 84,328 triliun. Dokumen sebagai dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2025 ini, antara lain, fokus pada penanganan banjir dan sekolah gratis.

Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 84,328 triliun disepakati dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/10/2024) sore. Jumlahnya lebih besar daripada KUA-PPAS tahun 2024, yakni Rp 81,5 triliun.

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penyusunan ataupun pengelolaan anggaran memerlukan integritas dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Artinya, anggaran dikelola dan digunakan secara efektif atau sesuai dengan peruntukannya.

"Jakarta meraih skor 97,35 persen dalam program pencegahan korupsi dari KPK pada tahun 2023. Semua pihak harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas," kata Heru, Rabu (9/10).

Program prioritas dalam KUA-PPAS tersebut, antara lain, penanganan banjir dan sekolah gratis. Banjir masih mendera Jakarta, baik kiriman dari hulu, saat hujan lokal, maupun rob atau pasang air laut. Wacana sekolah gratis

bergulir agar tidak ada lagi cerita anak putus sekolah ataupun ijazah ditahan karena tunggakan uang sekolah.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, kenaikan anggaran dalam KUA-PPAS dominan untuk program pengendalian banjir dan sekolah gratis. Salah satunya untuk kelanjutan normalisasi sungai dan kerja sama dengan 2.090 sekolah swasta gratis.

"Yang pasti normalisasi karena biayanya bengkak. Lalu, untuk sekolah gratis karena banyak anak tidak mampu dan harus masuk sekolah swasta," ujar Ima.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 7 kilome-

ter pada 2024. Normalisasi berjalan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Salah satunya di Kelurahan Rawajati.

Secara bertahap, Pemprov DKI Jakarta akan menawarkan kerja sama kepada 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat.

Berdasarkan portal data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan tingkat tiap provinsi, per 30 November 2023, terdapat 273 siswa putus sekolah di Jakarta. Mereka terdiri dari 78 siswa SMP, 32 siswa SMA, dan 163 siswa SMK.

(DAN)